

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan makmur sesuai dengan isi Pembukaan UUD 1945. Untuk dapat merealisasikan tujuan dari pembangunan Nasional tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan (Prayudha Setyandika, 2009). Anggaran pembangunan negara diperoleh dari berbagai sektor, seperti sektor perdagangan, migas, pertanian, kelautan dan lain-lain.

Bangsa Indonesia tidak mungkin selamanya mengandalkan sumber pendapatan negara dari sektor perdagangan, migas, pertanian, dan kelautan saja, sebab sumber daya alam di Indonesia saat ini mulai menipis dan membutuhkan waktu yang lama atau bahkan mungkin tidak dapat diperbarui lagi. Mengetahui hal tersebut maka pemerintah Indonesia mengupayakan pengoptimalan sumber penerimaan negara melalui sektor pajak sebagai salah satu sumber untuk dapat mewujudkan pembangunan nasional.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Dari pengertian diatas pajak digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan Nasional yang berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang

diperolehnya. Oleh karena itu peran masyarakat dalam Pembangunan Nasional harus terus ditingkatkan, salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak walaupun masyarakat tidak dapat merasakan secara langsung manfaat dari pembayaran pajak yang sudah dibayarkan. Pajak tersebut digunakan Negara untuk membangun bangsa secara luas dan membangun fasilitas-fasilitas umum di Indonesia.

Melalui reformasi perpajakan atau *Tax Reform* pada tahun 1983 sistem pemungutan pajak di Indonesia telah diubah dari asas *official assessment system* menjadi asas *self assessment system*. *Official assessment system* yaitu besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ditentukan oleh pemerintah, tanpa banyak melibatkan pihak wajib pajak. Wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak dengan membayar pajak, tanpa harus melakukan penghitungan, pengisian SPT, serta pelaporan. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, sistem ini ditetapkan dengan pemungutan pajak bersifat final dan pemungutan pajak ini tidak dapat sebagai kredit pajak. Misal PPh pasal 23 (Sigit Hutomo, 2009). Sedangkan *self assesment system* adalah wajib pajak berkewajiban mengurus sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, yang intinya adalah wajib pajak telah diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa semua Wajib Pajak yang telah memenuhi

persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Selain itu NPWP juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 5 UU KUP No. 16 tahun 2009, untuk mencegah usaha penghindaran dan atau perpanjangan waktu pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak yang harus dibayar sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang berakibat dengan pengenaan sanksi administrasi berupa Bunga bagi Wajib Pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilannya. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT maka dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000 untuk SPT masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan serta sebesar Rp100.00 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT.

Berdasarkan hasil penelitian Jatmiko (2006), menjelaskan bahwa sanksi diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar pajak. Dengan demikian diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para Wajib Pajak. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Dengan adanya reformasi perpajakan diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun ketahun akan mengalami peningkatan. Selain adanya revormasi perpajakan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak juga dapat melalui pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan apabila ada yang terlambat dalam melaporkan SPT nya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diketahui apakah Wajib Pajak sudah melaporkan SPT nya atau belum, karena apabila SPT sudah dilaporkan oleh Wajib Pajak berarti Wajib Pajak telah melaksanakan pembayaran pajaknya. Kalau Wajib Pajak belum melaporkan SPT nya maka dapat diketahui bahwa Wajib Pajak belum membayar pajaknya.

Dewasa ini pajak menjadi sumber penerimaan terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut data penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 1.1
Penerimaan APBN Tahun 2011-2015 (dalam Milyar Rupiah)

No.	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam milyar)		Prosentase Pajak
		APBN	Pajak	
1	2011	1.210.600	873.874	72,18%
2	2012	1.338.109,60	980.518,10	73,27%
3	2013	1.438.891,10	1.077.306,70	74,87%
4	2014	1.550.490,80	1.146.865,80	73,96%
5	2015	1.761.642,80	1.489.255,50	84,53%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjangkau wajib pajak baru (Harjanti Puspa Arum, 2012). Untuk meningkatkan penerimaan pajak Dirjen pajak tidak hanya melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak usaha lain yang dilakukan yaitu dengan adanya tax amnesty pajak pada tahun pajak 2015.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo sebagai instansi pemerintah yang melayani penerimaan pelaporan SPT khususnya wilayah kerja KPP Pratama Purworejo diharapkan dapat selalu meningkatkan penerimaan pajak di kabupaten Purworejo. Namun pada kenyataannya jumlah wajib pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT nya di KPP Pratama Purworejo dari beberapa tahun ini semakin menurun. Hal ini dapat dilihat dari tabel penerimaan SPT Tahunan di KPP Pratama Purworejo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 1.2
Penerimaan SPT Tahunan di KPP Pratama Purworejo dari tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (WP)	Jumlah WP Lapor SPT	Kepatuhan (SPT/WPx100%)
2011	42.128	29.223	69%
2012	47.728	33.461	70%
2013	53.258	33.901	64%
2014	60.300	34.627	57%
2015	67.244	35.040	52%

Sumber: KPP Pratama Purworejo, 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo semakin menurun. Dengan kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk membuat laporan tugas akhir dengan judul **“Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Purworejo”**

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang terjadi pada saat ini adalah bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo cenderung menurun dari tahun ketahun. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Purworejo?

3. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Purworejo.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kuisisioner yang diisi oleh responden, responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang ada di Kabupaten Purworejo dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2016.
3. Kuisisioner yang dipakai dalam penelitian ini bersumber dari penelitian sebelumnya oleh (Prasetyo, 2006) untuk pemahaman peraturan perpajakan, (Harjanti Puspa Arum, 2012) untuk sanksi pajak, dan (Jamiko, 2006) untuk kepatuhan wajib pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Purworejo.

3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Purworejo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi KPP Pratama Purworejo untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan mengetahui penyebab yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak.
- b. Sebagai dasar pijakan bagi peneliti berikutnya yang ingin memperdalam ataupun mengembangkan hasil penelitian ini lebih lanjut..

1.6 Metodologi Penelitian

- a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purworejo dengan responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel

independen (pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak)

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Menurut (Sarwono, 2012) Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai nara sumber. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi atau dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden yaitu orang yang kita jadikan sebagai objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa jawaban dari kuisioner yang diisi oleh responden.

c. Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono, 2010) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *sampling simple random sampling*. Menurut (Sugiyono, 2010) bahwa dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Teknik ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai nara sumber (Sarwono, 2012). Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan kuesioner kepada responden.

e. Metode Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliabel sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian.

a) Uji Validitas

Menurut (Ghozali, 2011) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner, maka kuesioner tersebut dikatakan valid.

b) Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2011) menjelaskan bahwa uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Apabila jawaban seseorang

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, maka kuisioner dikatakan reliable atau handal.

2. Uji Asumsi Klasik

Menurut (Hengki Latan dan Selva Tamalagi, 2013) pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi linear bertujuan untuk menghindari munculnya bias dalam analisis data serta untuk menghindari kesalahan spesifikasi (*misspecification*) model regresi yang digunakan. Uji asumsi klasik terdiri dari.

a) Uji Normalitas Data

Menurut (Hengki Latan dan Selva Tamalagi, 2013) pengujian terhadap asumsi klasik normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linear memiliki distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah yang residual datanya terdistribusi normal. Apabila pada grafik normal P-Plot tampak bahwa titik-titik berhimpit disekitar garis diagonal dan searah mengikuti garis diagonal maka hal ini dapat disimpulkan bahwa residual data memiliki distribusi normal, atau data memenuhi asumsi klasik normalitas.

b) Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi (Hengki Latan dan Selva Tamalagi, 2013).

c) Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Hengki Latan dan Selva Tamalagi, 2013) pengujian terhadap heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah *variance* dari residual data satu observasi ke observasi lainnya berbeda ataukah tetap. Model regresi yang diinginkan adalah homokedastisitas atau yang tidak heteroskedastisitas..

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan uji f, uji t dan analisis regresi berganda.

a) Uji F

Uji statistik F digunakan untuk pengujian model penelitian dengan tingkat signifikansi 5%. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, apabila nilai F hitung lebih besar dari pada F tabel maka model regresi layak digunakan (Harjanti Puspa Arum, 2012).

Menurut (Hengki Latan dan Selva Tamalagi, 2013) uji F pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen ataukah tidak. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan uji $F P < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b) Uji t

Menurut (Hengki Latan dan Selva Tamalagi, 2013) uji t pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan uji t $P < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c) Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis regresi yang dapat digunakan untuk digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen (Hengki Latan dan Selva Tamalagi, 2013).

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Proposal Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah dalam penyusunan dan penulisan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan penulis sebagai dasar dalam penyusunan laporan yang mendukung pada bab pembahasan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang sejarah dan perkembangan, struktur organisasi, serta fungsi dan tugas masing-masing bagian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo dan metodologi penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Purworejo.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, dan saran yang diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo.